

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

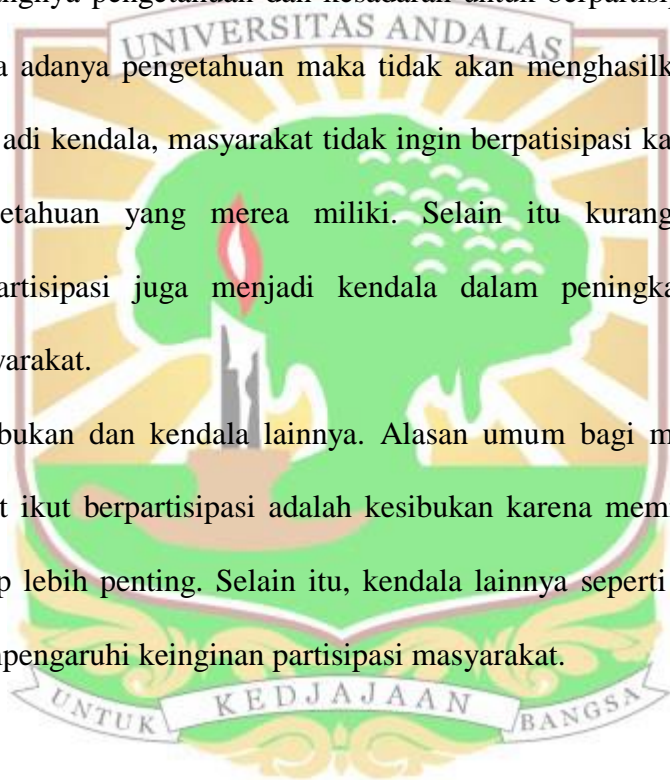
1. Partisipasi masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan desa baik dalam penetapan APB Desa, penetapan RKP Desa dan penetapan RPJM Desa telah diatur di dalam undang-undang dan peraturan. Dengan demikian undang-undang dan peraturan menjadi bentuk upaya pemerintah mempertahankan peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perkembangan daerah mereka masing-masing. Undang-undang dan peraturan ini menjadi nilai dan norma ideal untuk dipakai secara operasional bagi pemerintah dalam menghimpun masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka.
2. Kehadiran masyarakat berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (MUSRENBANG) tidak banyak, ini bisa dilihat di dalam daftar hadir Musrenbang nagari tahun 2020. Tidak banyaknya partisipasi masyarakat ini karena dalam penyerapan aspirasi dan pendapat masyarakat, pemerintah Nagari Koto Rantang menyediakan musyawarah khusus untuk berdiskusi dengan unsur masyarakat lainnya yang lebih beragam. Musyawarah Nagari (MUSNA) sebagai media penyaluran aspirasi dan pendapat masyarakat. Didalam Musna didiskusikan dengan

masyarakat apa yang akan dikerjakan atau kegiatan yang akan dilakukan di nagari kedepannya. Di dalam Musna kehadiran masyarakat lebih banyak dan beragam walaupun masih dalam keterwakilan dari kelompok masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika kehadiran masyarakat dalam Musrenbang sama banyak dengan Musna seperti yang terjadi pada tahun 2019. Hal ini tergantung seberapa besar keinginan masyarakat tersebut usulannya diprioritaskan dalam Musrenbang.

3. Dalam proses perencanaan pembangunan nagari sebelum diadakannya musyawarah, setiap jorong melakukan musyawarah jorong untuk menentukan usulan kegiatan yang akan disampaikan di dalam Musyawarah Nagari. Selanjutnya usulan kegiatan tersebut disampaikan di Musyawarah Nagari. Kemudian usulan yang telah di rapatkan di Musyawarah Nagari ditentukan prioritas pelaksanaannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari. Kehadiran masyarakat di dalam Musrenbang hanya perwakilan lembaga, pemerintah nagari dan masyarakat yang berkaitan erat dengan tema musyawarah. Setelah ditentukan prioritas pelaksanaannya maka usulan itu diajukan ke tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuannya.
4. Walaupun pemerintah telah menyediakan wadah untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka dalam perencanaan nagari masih adanya kendala dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Kendala bukan hanya karena kesibukan tetapi juga ada kendala lainnya.

Ada 3 kendala partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari diantaranya yaitu:

- a. Partisipasi melalui undangan. Masyarakat yang mengikuti muayawarah dalam diskusi perencanaan nagari adalah masyarakat yang mendapatkan undangan. Ini menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi tetapi tidak mendapatkan undangan.
- b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk berpartisipasi. Partisipasi tanpa adanya pengetahuan maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini menjadi kendala, masyarakat tidak ingin berpartisipasi karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu kurangnya kesadaran berpartisipasi juga menjadi kendala dalam peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Kesibukan dan kendala lainnya. Alasan umum bagi masyarakat tidak dapat ikut berpartisipasi adalah kesibukan karena memnuhi kebutuhan hidup lebih penting. Selain itu, kendala lainnya seperti kesehatan juga mempengaruhi keinginan partisipasi masyarakat.



4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada beberapa pihak adalah:

1. Hendaknya pemerintah nagari melakukan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan nagari. Pemberian pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan ini masyarakat merasa perlu terlibat dalam perencanaan pembangunan nagari. Tentunya

sosialisasi ini harus dengan evaluasi berkelanjutan agar pemberdayaan yang dilakukan membuahkan hasil yaitu partisipasi masyarakat meningkat dalam setiap kegiatan..

2. Hendaknya lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari Koto Rantang juga memberikan pengetahuan dan merangkul masyarakat yang belum tergabung agar mau tergabung ke dalam lembaga kemasyarakatan. Karena partisipasi masyarakat dalam musyawarah melalui undangan yang disebar.

3. Hendaknya masyarakat Nagari Koto Rantang meningkatkan swadainya dan mau tergabung kedalam lembaga serta aktif sebagai anggota. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari. Juga, hendaknya masyarakat meluangkan waktunya untuk mau berpartisipasi membangun nagari mereka sendiri menjadi nagari yang sejahtera.

